

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Triwulan I 2025, dinamika inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mengalami fluktuasi sebagai berikut:

<b>Bulan/Inflasi</b>	<b>m-t-m (%)</b>	<b>y-o-y (%)</b>	<b>y-t-d (%)</b>
Januari	-0,46	-0,53	-0,46
Februari	-0,81	-1,06	-1,26
Maret	2,40	0,74	1,11

Pada triwulan pertama tahun 2025, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menghadapi dinamika inflasi yang fluktuatif. Pada bulan Januari dan Februari, terjadi deflasi masing masing sebesar -0,46% dan -0,81% secara bulanan (m-to-m), yang turut menyebabkan penurunan inflasi tahunan (y-on-y) menjadi -0,53% dan -1,06% serta inflasi tahun berjalan (ytd) menjadi -0,46% dan -1,26%. Deflasi ini dipicu oleh adanya diskon tarif listrik nasional yang diberlakukan pada awal tahun dan hasil panen beberapa komoditas utama seperti tomat dan ikan lokal yang melimpah, menyebabkan penurunan harga di pasar.

Namun, pada bulan Maret, kondisi berbalik dengan mencatatkan inflasi bulanan yang signifikan sebesar 2,40%, inflasi tahunan sebesar 0,74%, dan inflasi tahun berjalan sebesar 1,11%. Inflasi ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan harga bahan makanan pokok menjelang bulan Ramadhan. Komoditas seperti ikan air tawar, tomat, cabai, dan bawang mengalami lonjakan harga akibat meningkatnya permintaan musiman.

Ke depan, beberapa risiko inflasi telah diidentifikasi, antara lain:

1. Faktor Musiman, seperti lonjakan permintaan bahan pokok selama Ramadhan dan Idul Fitri.
2. Ketergantungan Pasokan Eksternal, di mana pasokan yang berasal dari luar daerah sangat tergantung pada kondisi cuaca dan logistik.
3. Kenaikan Harga Komoditas Global, terutama kopi dan emas, yang bisa berdampak pada inflasi lokal, khususnya di sektor jasa dan konsumsi.
4. Berakhirnya Subsidi Energi, yaitu pencabutan diskon tarif listrik yang menambah beban pengeluaran rumah tangga, dan secara tidak langsung mendorong inflasi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam menganalisis berbagai faktor penyebab tekanan inflasi di daerah, TPID HST mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang signifikan, yakni:

1. Faktor Musiman dan Cuaca: Musim hujan telah mengakibatkan penurunan produksi komoditas tertentu seperti cabai. Produksi yang terbatas menyebabkan harga cabai naik tajam.
2. Permintaan Spesifik: Kegiatan keagamaan besar seperti Haul Guru Sekumpul yang menyedot massa dalam jumlah besar menyebabkan lonjakan permintaan pada komoditas seperti ayam dan telur.
3. Distribusi Terbatas: Keterbatasan distribusi, terutama menjelang Ramadhan, menyebabkan harga beberapa bahan pokok seperti santan dan bumbu dapur naik.
4. Fluktuasi Harga Emas dan Kopi: Komoditas ini mengikuti tren pasar global yang sedang mengalami kenaikan harga. Dampaknya terasa dalam sektor konsumsi dan jasa.
5. Transisi Tarif Listrik: Berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik pada bulan Maret memberikan tekanan baru pada biaya rumah tangga dan turut menyumbang tekanan inflasi non-pangan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk mengantisipasi dan meredam tekanan inflasi, TPID HST telah melaksanakan sejumlah kebijakan strategis, baik dari sisi harga, distribusi, maupun komunikasi publik:

1. Menjaga Stabilitas Harga dan Distribusi:  
Pelaksanaan Pasar Murah di lima kecamatan serta di Kantor Polres HST menjelang Ramadhan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat.  
Sidak Pasar dan Monitoring Harga, dilakukan secara rutin bekerja sama dengan Polres dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, guna menekan potensi spekulasi harga dan tindakan penimbunan.
2. Penyediaan Informasi dan Edukasi:  
Rutin dilakukan publikasi informasi harga melalui media sosial resmi @kominfo\_hst sebagai upaya membangun transparansi harga dan meningkatkan kesadaran konsumen.  
Rapat Koordinasi TPID yang dilaksanakan pada 18 Maret 2025 berhasil menyusun langkah-langkah strategis menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri.

Intervensi Produk Lokal:

Pelaksanaan Program Distribusi Bibit dan keterlibatan dalam Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang mendukung peningkatan produksi telur ayam lokal.

Pemantauan Rutin oleh Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Pertanian dalam memastikan stok dan harga komoditas tetap stabil.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah dijalankan selama triwulan pertama 2025, TPID HST menyoroti sejumlah kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

**Kekuatan:**

Pasar Murah terbukti efektif menahan lonjakan harga di wilayah-wilayah yang menjadi lokasi sasaran.

Informasi digital melalui media sosial berhasil menjangkau kalangan muda dan pengguna aktif internet, yang memperkuat literasi harga di kalangan masyarakat.

Program bantuan bibit dan intervensi produksi lokal terbukti meningkatkan suplai, sehingga tekanan terhadap pasokan dari luar daerah dapat ditekan.

**Kelemahan:**

Jangkauan pasar murah masih terbatas, belum mencakup seluruh kecamatan.

Distribusi informasi belum merata, terutama ke daerah desa dan kelompok masyarakat lanjut usia yang kurang terakses teknologi digital.

Pengawasan distribusi LPG bersubsidi dan pupuk masih kurang optimal karena keterbatasan pengawasan di lapangan.

Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pemantauan langsung terbatas, sebagian karena adanya restrukturisasi di tingkat pusat.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk memperkuat strategi ke depan dan meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi, TPID HST mengusulkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang menyentuh lima aspek penting, yakni:

1. Aspek Ketersediaan Pasokan:

Meningkatkan koordinasi distribusi dengan Bulog dan distributor utama.

Mempercepat operasionalisasi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Murakata dan memaksimalkan pemanfaatan lahan milik Bulog.

2. Aspek Keterjangkauan Harga:

Melanjutkan dan memperluas jangkauan pasar murah hingga ke wilayah terpencil.

Memberikan subsidi distribusi dan memperkuat penyaluran bantuan pangan strategis kepada masyarakat rentan.

3. Aspek Kelancaran Distribusi:

Mengintensifkan pengawasan terhadap LPG 3 kg dan komoditas pokok, termasuk potensi penimbunan.

Melakukan penataan pasar untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien dan transparan.

4. Aspek Komunikasi Efektif:

Menggalakkan kampanye konsumsi bijak secara lintas media agar masyarakat memiliki pemahaman tentang konsumsi sehat dan efisien.

Menyediakan publikasi berkala harga dan jadwal pasar murah sebagai informasi publik yang mudah diakses.

5. Aspek Inisiatif dan Inovasi Daerah:

Melanjutkan Gerakan Menanam Cabai oleh ASN dan SKPD untuk mendukung kemandirian komoditas lokal.

Mendorong pembangunan green house dan pengembangan pertanian berbasis komunitas.

Mengoptimalkan peran ASN fungsional dan metode sampling dalam kegiatan pemantauan harga.

Mengembangkan aplikasi pelaporan harga berbasis digital untuk mempercepat respon terhadap dinamika pasar.